

Tradisi dan Aspirasi: Sebuah Dilema Pembangunan Pariwisata di Pantai Nula, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Graceilla Margareth Meilenia Telnoni¹, Aldi Herindra Lasso²
Universitas Kristen Satya Wacana, aldi.lasso@uksw.edu

ABSTRAK

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berfokus pada partisipasi masyarakat sering kali menghadapi tantangan, salah satunya adalah heterogenitas masyarakat. Komunitas sering dipandang sebagai entitas homogen, sehingga kurang menyoroti kompleksitas internal masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dalam komunitas yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Nula. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dinilai paling tepat untuk memahami dan menggambarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam dan sistematis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Nualunat terdapat hambatan dalam partisipasi masyarakat yang diakibatkan oleh tradisi yang membatasi kesempatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan, perbedaan pandangan terhadap pembangunan pariwisata Pantai Nula, serta dominasi tokoh adat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata Pantai Nula hanya dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kesepahaman antara pemangku kepentingan terutama antara pemangku adat dan masyarakat. Kasus yang terjadi di Desa Nualunat dapat menjadi pelajaran penting bagi studi pariwisata berbasis masyarakat di masa mendatang, khususnya dalam menekankan pentingnya elaborasi heterogenitas masyarakat yang menjadi sumber dinamika sosial, serta perlunya eksplorasi strategi mediasi yang efektif antara otoritas adat dan masyarakat guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pariwisata berbasis masyarakat, heterogenitas, partisipasi masyarakat, pembangunan pariwisata

ABSTRACT

Community-based tourism development that focuses on community participation often faces challenges, one of which is community heterogeneity. Communities are often viewed as homogeneous entities, thus under-reflecting the internal complexity of the community. With this background, this study aims to analyze internal factors in the community that influence community participation in tourism development at Nula Beach. A qualitative descriptive approach is used in this study because it is considered the most appropriate for understanding and describing the social reality that occurs in the field in depth and systematically using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation studies. The results of the study indicate that in Nualunat Village there are obstacles to community participation caused by traditions that limit the opportunity for the community to voice their aspirations in the decision-making process, differences in views on the development of Nula Beach tourism, and the dominance of traditional figures in decision-making. This study concludes that the success of Nula Beach tourism development can only run well if there is an understanding between stakeholders, especially between traditional stakeholders and the community. The case that occurred in Nualunat Village can be an important lesson for future community-based tourism studies, especially in emphasizing the importance of elaborating the heterogeneity of the community that is the source of social dynamics, as well as the need to explore effective mediation strategies between customary authorities and the community in order to realize inclusive and sustainable tourism development.

Keywords: community-based tourism, heterogeneity, community participation, tourism development

PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan pariwisata yang dilakukan saat ini harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap generasi mendatang (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Untuk mencapai tujuan ini, keberhasilan pembangunan pariwisata harus mampu untuk melibatkan dan memperhatikan kebutuhan serta pandangan dari seluruh *stakeholder*, yang mencakup pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), pengusaha, wisatawan dan yang terpenting masyarakat setempat (Fatin et al., 2024). Disinilah pariwisata berbasis masyarakat menjadi pendekatan yang sangat penting. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama di dalam kepariwisataan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan (Kanom et al., 2023; Mirayani et al., 2023). Dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama, mereka dapat memajukan pariwisata sambil tetap menjaga keseimbangan lingkungan, budaya, dan sosial di daerah mereka (Asy'ari et al., 2021). Pendekatan ini selaras dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mana harus didukung dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat (Prathama et al., 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata telah menjadi topik perdebatan yang cukup luas dalam literatur akademis maupun implementasi di lapangan. Terdapat dua pandangan utama terkait hal ini. Pandangan pertama lebih menitikberatkan pada peran investor atau sektor swasta dalam mendorong perkembangan pariwisata, dengan asumsi bahwa mereka memiliki akses pada modal, teknologi, dan jaringan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi (Arifin & Fathurrohman, 2022). Pandangan ini dikritik karena pada praktiknya, berpotensi mengalienasi

masyarakat lokal dari tanah dan sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka (Tosun, 2000). Pada saat masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan serta tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak jarang berakibat munculnya konflik atau terhambatnya pembangunan pariwisata (Sekarningrum et al., 2020). Ditambah lagi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada investor eksternal sering kali menyebabkan masyarakat hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri serta kurang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan langsung dari pariwisata (Kurniawan et al., 2023; Mubaroq et al., 2025).

Pandangan kedua adalah pandangan pendekatan yang menekankan pada pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan pariwisata karena komunitas lokal dianggap sebagai sumber utama dalam mempertahankan produk lokal (Utami et al., 2022; Yulistianeu et al., 2023). Dengan melibatkan masyarakat, mereka tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga dapat merasakan manfaat ekonomis dan sosial dari kegiatan pariwisata (Violin et al., 2025). Pendapat ini didukung oleh teori pembangunan berkelanjutan yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan jangka panjang suatu destinasi wisata (Tosun, 2000). Tidak hanya keberhasilan, kegagalan suatu proyek pariwisata seringkali bergantung pada seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan.

Sejalan dengan pandangan terakhir, penelitian ini berpandangan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata memainkan peran yang sangat penting dalam mensukseskan pengembangan pariwisata (Adinugraha et al., 2022; Syarifuddin, 2024). Dengan melibatkan masyarakat, masyarakat dapat berkontribusi

dalam pengambilan keputusan, mengelola sumber daya, dan menciptakan peluang usaha lokal. Hal ini tidak secara langsung membantu menghindari ketergantungan berlebihan pada pihak luar, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan pariwisata dapat berkelanjutan dan inklusif.

Namun demikian, pendekatan yang mengedepankan partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan efektif, terutama terkait dengan masalah heterogenitas masyarakat itu sendiri (S. E. P. Dewi & Lasso, 2022; Lasso & Dahles, 2023). Sebagian besar literatur yang membahas partisipasi masyarakat dalam pariwisata cenderung melihat komunitas sebagai entitas yang homogen (S. E. P. Dewi & Lasso, 2022; Lasso & Dahles, 2023). Asumsi ini menimbulkan masalah ketika dihadapkan dengan realitas bahwa masyarakat selalu bersifat heterogen, dengan struktur sosial, demografi kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda (Hermawan & Hutagalung, 2021). Studi-studi ilmiah sebelumnya kurang menyoroti kompleksitas internal masyarakat, di mana berbagai kelompok memiliki preferensi yang saling bertentangan dan kepentingan yang berbeda (Dewanti & Gustaman, 2021; Sekarningrum et al., 2020; Tjilen et al., 2023). Hal ini seringkali membuat proses pengambilan keputusan kolektif menjadi lebih rumit, khususnya dalam konteks pembangunan pariwisata yang melibatkan banyak pihak.

Dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, heterogenitas ini dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat partisipasi masyarakat. Tidak jarang, masyarakat lokal terdiri dari kelompok-kelompok dengan pandangan dan kepentingan yang berbeda mengenai bagaimana pariwisata harus dikembangkan. Beberapa kelompok mungkin mendukung pembangunan pariwisata karena melihatnya sebagai peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan, sementara kelompok lain khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal (Susanti et al., 2025). Perbedaan pandangan ini mendorong perlunya pendekatan yang lebih peka terhadap konteks

sosial lokal dalam merancang strategi pembangunan.

Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda dari studi-studi sebelumnya, yang umumnya memandang masyarakat sebagai entitas homogen. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menyoroti kompleksitas internal masyarakat, terutama di wilayah dengan struktur sosial adat yang masih sangat kuat, seperti Desa Nualunat. Terletak di Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, desa ini mencerminkan realitas sosial yang tidak hanya kaya akan tradisi, tetapi juga dipenuhi dengan dinamika struktur sosial adat kuat.

Dalam konteks pengembangan pariwisata di Pantai Nula, peran sentral pemangku adat dalam pengambilan keputusan mencerminkan kuatnya struktur sosial dan kekuasaan adat di Desa Nualunat. Meskipun kawasan ini memiliki potensi wisata yang besar, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan internal yang berkaitan dengan dinamika sosial yang kompleks. Aspek ini masih jarang mendapat perhatian dalam kajian pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sehingga penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana struktur sosial tersebut mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dalam komunitas yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Nula, guna menyusun strategi pembangunan pariwisata yang inklusif. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat juga perlu dipahami sebagai proses yang berlangsung pada berbagai tingkatan keterlibatan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Dengan pendekatan ini, kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih realistis mengenai praktik pariwisata berbasis masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan yang

berlandas pada kebutuhan dan potensi lokal secara menyeluruh.

KAJIAN PUSTAKA

Tangga Partisipasi Arnstein

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai tingkat partisipasi ini adalah konsep tangga partisipasi (Arnstein, 1969), di mana setiap tingkatan mencerminkan seberapa besar keterlibatan dan pengaruh masyarakat dalam perencanaan serta pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata.

Tabel 1. Tangga Partisipasi (Arnstein, 1969)

<ul style="list-style-type: none"> • 8. Citizen Control • 7. Delegated Power • 6. Partnership 		Degrees Of Citizen Power
<ul style="list-style-type: none"> • 5. Placation • 4. Consultation • 3. Informing 		Degrees Of Tokenism
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Therapy • 1. Manipulation 		Non Participation

Jika melihat tangga partisipasi Arnstein diatas, kedelapan tipe partisipasi ini kemudian dibagi menjadi tiga kelompok tipe partisipasi. Tangga 1 Manipulasi dan tangga 2 Terapi, dikelompokkan sebagai “Tidak Ada Partisipasi”, yaitu tingkatan terbawah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat hanya bersifat simbolis untuk mencapai tujuan pemegang kekuasaan (berjalan satu arah). Selanjutnya, tangga 3 Pemberian Informasi, tangga 4 Konsultasi, dan tangga 5 Penentraman, dikelompokkan sebagai “Tingkat Pertama Partisipasi” dimana masyarakat sudah bisa memberikan masukan, pendapat dan informasi namun keputusan akhir tetap berada pada tangan pemegang kekuasaan. Tingkat tertinggi yaitu tangga 6 Kemitraan, tangga 7 Kekuasaan yang Didelegasikan, dan tangga 8 Kontrol Warga yang dikelompokkan sebagai “Tingkat Kekuasaan Warga” di sini, peran pemegang kekuasaan sangat minim, masyarakat dan

pemegang kekuasaan mampu melakukan negosiasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, namun proses pengambilan keputusan tetap berada ditangan masyarakat.

Otoritas Pemimpin Adat

Dalam konteks masyarakat adat, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pemimpin adat yang memiliki peranan yang vital di masyarakat.

Menurut teori otoritas tradisional, seorang pemimpin adat merupakan tokoh sentral yang memiliki otoritas yang berasal dari keyakinan masyarakat terhadap tradisi yang telah diwariskan, di mana legitimasi kepemimpinan tersebut diperoleh melalui beberapa hal, seperti kelahiran dari keluarga atau suku tertentu, memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam, atau karena prestasi dan jasa yang telah dicapai dalam masyarakat (Weber, 1978). Di sisi lain, otoritas pemimpin adat juga dapat diperoleh melalui kemampuan pemimpin adat untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari orang-orang disekitar melalui karisma dan kekuatan pribadi yang dimiliki. Karisma ini didasari oleh kebijaksanaan yaitu pengetahuan akan adat dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, pemimpin adat memiliki hubungan yang erat dengan dunia spiritual, sehingga membuat mereka dianggap memiliki kekuatan lebih untuk membimbing masyarakat (Weber, 1978). Dengan otoritas yang dimiliki, pemimpin adat juga berperan sebagai penjaga keseimbangan antara masyarakat manusia, lingkungan serta entitas spiritual. Pemimpin adat wajib memastikan bahwa masyarakat hidup selaras dengan alam dan menjaga hubungan dengan entitas spiritual yang diyakini oleh masyarakat, sehingga keseimbangan tidak hanya mencakup aspek fisik dan sosial namun juga seimbangan dalam aspek spiritual (Giddens, 1984). Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan pemimpin adat akan dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Mengacu pada pentingnya posisi pemimpin adat dalam masyarakat, kewenangan dan otoritas

pemangku adat merupakan salah satu faktor krusial yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Dalam prakteknya, partisipasi masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana otoritas memberikan ruang untuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dengan pengaruh masyarakat yang terbatas jika hanya berada pada tingkat rendah seperti konsultasi (Arnstein, 1969). Menggarisbawahi situasi tersebut, teori kepemimpinan partisipatif mendorong pemimpin adat untuk dapat menerapkan pendekatan kepemimpinan partisipatif (Ralph & Lippit, 2001), di mana mereka berperan sebagai fasilitator, yang artinya mereka membantu memfasilitasi diskusi dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pemimpin adat berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan hanya memutuskan sendiri.

Selain dipengaruhi oleh kepemimpinan adat, partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh motivasi individu, baik untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan sosial, juga menjadi pendorong utama dalam partisipasi. Dalam konteks masyarakat adat, faktor sosial dan budaya, termasuk norma-norma dan struktur hierarki dalam masyarakat adat, dapat membatasi atau memperluas tingkat partisipasi berdasarkan peran sosial yang ada (Arnstein, 1969).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pantai Nula, Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, hingga saat ini, Pantai Nula masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat di bawah koordinasi Pemangku Adat tanpa pengelolaan secara resmi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kedua, Pantai Nula memiliki keunikan tersendiri dengan bibir pantai yang dihiasi oleh batu berwarna-warni, berbeda dengan kebanyakan pantai yang umumnya berpasir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Teknik *snowball sampling* untuk memilih informan. Seluruh proses pengambilan data dilakukan berdasarkan persetujuan informan, dengan tetap memperhatikan etika penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan dan pencari batu warna, satu pemangku adat yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan di Desa Nualunat, serta dua orang perwakilan dari pemerintah desa. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan peran, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan Pantai Nula. Informan-informan ini dipilih untuk mendapatkan perspektif dari berbagai sudut pandang agar data yang diperoleh cukup kaya dan mendalam untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

Setelah semua data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen terkumpul, peneliti melakukan analisis data menggunakan enam langkah dalam menganalisis data, yang merujuk dari teknik analisis data tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pantai Nula dan Penghidupan Masyarakat Desa Nualunat

Desa Nualunat terletak di Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jarak tempuh sekitar 148-150 km dari Kota Kupang. Perjalanan menuju desa ini memerlukan waktu sekitar 3-5 Jam. Untuk akses jalan menuju desa terbilang sudah sangat mudah karena sudah diaspal dan merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka. Saat ini, jumlah penduduk Desa Nualunat mencapai 1.253 orang yang terbagi dalam 13 RT. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani, dan yang terbaru mencari batu warna.

Nelayan umumnya menangkap jenis ikan tembang, karena menyesuaikan dengan sampan dan ukuran peralatan yang terbilang kecil. Sementara itu, para petani biasanya menanam sayur-sayuran, memanen hasil hutan seperti asam, kemiri, dan tembakau untuk dijual pada hari pasar tiba.



Gambar 1. Aktivitas Nelayan di Pantai Nula

Di sisi lain, meskipun tidak ada aturan resmi, berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa dalam sebuah rumah tangga, jika kepala keluarga sudah bekerja sebagai nelayan, maka sang istri biasanya bekerja sebagai pencari batu warna.

Kegiatan sehari-hari masyarakat sering berpusat di pantai Nula, yang terletak 3,5 km dari Desa Nualunat. Pantai ini merupakan tempat yang penting dalam kehidupan masyarakat setempat karena merupakan tempat melaut dan lokasi pencarian batu warna.



Gambar 2. Aktivitas Pencari Batu Warna di Pantai Boisae

Sebagai tempat yang penting bagi kegiatan sehari-hari masyarakat baik kegiatan melaut dan mencari batu warna, Pantai Nula juga memiliki daya tarik khas yang dapat menjadikannya sebagai destinasi wisata yang potensial. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pantai lain, karena bukannya dihiasi dengan pasir, tepi Pantai Nula dipenuhi dengan bebatuan bulat

berwarna-warni yang membuat Pantai Nula semakin istimewa adalah gradasi warna air lautnya. Air laut yang berwarna biru muda dan biru tua menambah keindahan pantai ini.

Sebagai tempat yang strategis dan penting bagi nelayan serta pencari batu warna, Pantai Nula saat ini telah mengalami perubahan. Dikarenakan keunikan daya tarik Pantai Nula berupa pantai yang dipenuhi batu warna, sehingga sejak tahun 2020 berdasarkan pengamatan penulis keadaan mulai berubah. Pantai Nula tiba-tiba menjadi viral di media sosial, terutama di Instagram melalui akun pariwisata lokal *@exploretts*. Akun ini berfokus untuk mempromosikan objek wisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara melibatkan wisatawan dalam setiap postingannya serta memiliki jumlah pengikut sebanyak 2.4K. Postingan ini berdampak pada peningkatan minat kunjungan.

Pantai Nula berubah dari yang awalnya jarang dikenal dan hanya dikenal oleh penduduk lokal sebagai tempat melaut dan mencari batu warna, kini telah berubah menjadi pantai yang menarik perhatian wisatawan. Perubahan ini terjadi secara bertahap, dimulai dari tersebarnya foto-foto keindahan Pantai Nula di media sosial, hingga akhirnya menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Awalnya, hanya pengunjung dari daerah setempat yang datang, namun kini tidak hanya wisatawan domestik melainkan wisatawan dari negara-negara seperti India, Korea, China, bahkan Amerika dalam jumlah yang besar. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Nula umumnya datang setiap akhir pekan, dengan jumlah pengunjung paling tinggi pada hari Sabtu.

Wisatawan sering melakukan berbagai aktivitas yang menarik ketika berkunjung ke Pantai Nula, seperti berfoto di spot-spot yang menarik, bermain air di tepian pantai, berburu batu warna-warni di sepanjang pantai untuk dijadikan kenang-kenangan. Berpiknik di tepi pantai dan yang paling sering dilakukan wisatawan asing adalah berjemur di pantai dan berinteraksi dengan masyarakat yang tinggal di rumah darurat nelayan di pinggir pantai.

Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam aktivitas di Pantai Nula, dimana sebelumnya hanya menjadi tempat bagi nelayan untuk melaut dan pencari batu warna untuk menambang, kini muncul aktivitas baru, yaitu kunjungan wisatawan. Masyarakat setempat berharap pengembangan pariwisata di Pantai Nula dapat lebih berkembang secara terarah dan mampu memberikan manfaat bagi mereka.

Pentingnya Pemerintahan Adat Bagi Masyarakat Nualunat

Di Desa Nualunat, struktur pemerintah tingkat desa secara resmi diatur dan dijalankan oleh pemerintah desa, yang mencakup kepala desa serta perangkatnya. Namun, Nualunat masih sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi sehingga selain pemerintah desa peran pemerintah adat tetap sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun pemerintah adat tidak termasuk dalam struktur pemerintahan formal, pengaruhnya tetap kuat terutama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan desa dan keharmonisan masyarakat.

Proses pemilihan kepala desa dan pemangku adat memiliki cara yang berbeda. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui proses pemilihan resmi yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan, kedudukan pemangku adat di Desa Nualunat diwariskan secara turun-temurun atau didasarkan pada garis keturunan yang sudah ada sejak lama.

Pemerintah desa dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus administrasi dan membantu menyediakan fasilitas dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, masyarakat memandang pemangku adat sebagai tokoh yang sangat dihormati. Dia dianggap sebagai penjaga utama adat istiadat serta tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun karena sangat memahami adat istiadat di Desa Nualunat, serta aturan dan nilai yang harus dijaga oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemangku adat sering menjadi tempat bertanya atau meminta petunjuk dalam berbagai hal, seperti upacara adat, penyelesaian masalah, hingga

keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa. Setiap keputusan dan nasihat pemangku adat sangat dihargai dan sering menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena dipercaya memiliki pemahaman spiritual yang mendalam.

Menurut pemangku adat Nualunat, *“Tugas utama saya sebagai pemangku adat adalah membina dan mengayomi masyarakat agar tetap menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun, dengan tetap bersikap dinamis terhadap perubahan zaman. Saya juga turut mengawasi setiap aktivitas masyarakat, memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari norma-norma adat yang berlaku.”*

Pemangku adat, biasanya berkoordinasi dengan pemerintah desa (Pemdes) melalui pertemuan atau musyawarah desa.

“Dalam musyawarah ini, pemangku adat bersama perangkat desa akan berdiskusi tentang berbagai masalah atau rencana yang menyangkut kepentingan masyarakat” (Perangkat desa, 2024).

Sistem koordinasi yang diterapkan bersifat partisipatif, dimana pemerintah desa akan berkonsultasi atau meminta pertimbangan terlebih dahulu dengan pemangku adat sebelum mengambil keputusan yang berhubungan dengan masyarakat atau sumber daya desa. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau tindakan yang akan diambil sejalan dengan nilai-nilai adat serta tidak menimbulkan gesekan atau konflik di dalam masyarakat yang masih sangat menghormati tradisi.

Ini menunjukkan adanya perbedaan struktural yang mendalam antara pemerintah formal dan pemerintah adat. Di banyak daerah, sistem pemerintah formal bisa dengan mudah mengintervensi berbagai kebijakan, tetapi di Nualunat keputusan adat tetap

memiliki kekuatan utama. Hal ini mencerminkan konsep otoritas tradisional di mana kepemimpinan didasarkan pada tradisi dan diwariskan secara turun-temurun (Weber, 1978). Pemangku adat tidak hanya menjadi simbol budaya, melainkan juga sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan. Otoritas ini diperoleh bukan hanya karena garis keturunan, tetapi juga karena pemangku ada memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat istiadat, spiritualitas, dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kewenangan pemangku adat terlihat jelas dari bagaimana setiap keputusan yang diambil pada forum diskusi selalu mendapatkan persetujuan daripada pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hal ini mencakup bagaimana pengelolaan pantai, penggunaan sumber daya di area pantai, dan ketidakinginan untuk melibatkan pihak luar dalam proses pengembangan Pantai Nula. Pendekatan ini sejalan dengan teori kepemimpinan partisipatif, yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Ralph & Lippit, 2001). Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua keputusan diambil melalui diskusi dengan masyarakat. Ada keputusan-keputusan tertentu yang langsung diambil oleh pemangku adat tanpa perlu melibatkan masyarakat, terutama jika keputusan tersebut dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab atau wewenang pemangku adat.

Keputusan tersebut biasanya berkaitan dengan adat istiadat, aturan-aturan tradisi, dan hal-hal yang dianggap sakral. Masyarakat pun akan menerima keputusan tersebut karena menghormati peran pemangku adat sebagai penjaga tradisi dan keseimbangan sosial.

Pandangan Masyarakat Nualunat Terhadap Pembangunan Pariwisata

Masyarakat Desa Nualunat memiliki harapan besar terhadap pembangunan pariwisata di Pantai Nula. Mereka meyakini bahwa dengan adanya pengembangan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian desa yang selama ini bergantung pada sektor perikanan dan

pencarian batu warna. Dengan berkembangnya pariwisata, mereka berharap agar mampu menciptakan peluang kerja baru yang lebih beragam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Peluang kerja baru yang diharapkan meliputi pekerjaan sebagai penjaga karcis masuk, yang bertugas memastikan setiap wisatawan tercatat dan memberikan kontribusi melalui tiket masuk; penjaga parkir yang mengelola area parkir dengan baik; serta pengelola fasilitas wisata seperti kamar mandi umum, yang selalu menjaga kebersihan dan ketersediaan fasilitas bagi wisatawan. Selain itu, mereka juga membayangkan peran kreatif yang melibatkan anak-anak setempat, seperti “fotografer cilik”. Penjelasan tersebut semakin dipertegas oleh salah satu narasumber yang menyatakan bahwa;

“Siap menjadi pelaku daripada setiap aktivitas yang ada di dalam area pantai. Misalnya, berpartisipasi dalam membersihkan batu-batu yang menghalangi jalan dan menata lahan sekitar, menjadi petugas karcis atau berperan sebagai “fotografer cilik”, dimana anak-anak bisa membantu mengarahkan gaya wisatawan untuk mengambil gambar yang menonjolkan tiga batu besar yang menjadi ikon Pantai Nula (Narasumber 4)”.

Masyarakat juga melihat peluang untuk mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diperkuat oleh pandangan dua narasumber yang memberikan gambaran lebih rinci tentang keterlibatan masyarakat dalam sektor UMKM. Salah satu narasumber menyatakan bahwa;

“Masyarakat juga bisa terlibat sebagai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di area pantai, seperti menjual cemilan, makanan dan minuman khas daerah (Narasumber 7)”.

Sementara itu narasumber satunya menyoroti peran penting ibu rumah tangga dengan menjelaskan;

“Kontribusi daripada ibu rumah tangga juga tidak kalah penting. Mereka siap berpartisipasi dengan menjual kerajinan tangan khas daerah, seperti kain tenun, anyaman nyiru, anyaman tikar, anyaman tempat sirih, dan berbagai produk kerajinan lainnya (Narasumber 8)”.

Lebih lanjut, masyarakat juga menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih teknis seperti siap menjadi pelaku daripada setiap aktivitas yang ada di dalam area pantai. Masyarakat ingin melihat Pantai Nula berkembang menjadi destinasi wisata yang sukses, seperti halnya Pantai Kolbano dan Pantai Oetune, yang telah berhasil menarik banyak wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya. Sehingga, akhirnya Pantai Nula dapat menjadi destinasi wisata yang tidak hanya ramai dikunjungi tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Berdasarkan harapan masyarakat Nualunat yang digambarkan dengan jelas oleh informan diatas, menunjukkan bahwa ketika Pantai Nula ini dikembangkan maka seluruh lapisan masyarakat Desa Nualunat mulai dari anak-anak hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan kegiatan pariwisata di Pantai Nula. Mereka ingin menjadi bagian dari perubahan positif yang diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi desa mereka. Setiap masyarakat menawarkan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan dan perannya. Harapan dan keinginan ini mencerminkan potensi besar masyarakat Nualunat untuk bersama-sama membangun Pantai Nula sebagai destinasi wisata yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Sebagai tokoh yang dihormati, pemangku adat memiliki pandangan yang

kurang mendukung pengembangan pantai ini sebagai destinasi wisata. Sehingga saat ini proses pengembangannya masih berjalan lambat. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksetujuan pemangku adat terhadap adanya intervensi dari pemerintah, khususnya pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemangku adat merasa jika pariwisata dikembangkan dengan melibatkan pihak eksternal, maka aktivitas masyarakat seperti melaut dan mencari batu warna akan mengalami pembatasan. Pemangku adat ingin memastikan bahwa kebebasan masyarakat dalam memanfaatkan pantai ini tidak terganggu oleh peraturan baru yang mungkin akan diterapkan oleh pihak eksternal, misalnya pengenaan biaya karcis kepada masyarakat setempat ketika ingin masuk ke area pantai.

Selain itu, pemangku adat juga memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan tradisi serta warisan turun temurun dari nenek moyang, yang selama ini dijaga kealamian dan keindahan alam Pantai Nula, yang hingga kini dianggap sebagai tempat yang sakral dan keramat oleh masyarakat setempat. Di Pantai Nula, berbagai ritual adat masih sering dilakukan. Misalnya, ritual meminta hujan ketika memasuki musim tanam, ritual meminta kesuburan tanah, dan ritual meminta hasil laut masih sering dilakukan.

Menurut pemangku adat, meskipun nantinya akan ada keinginan untuk mengembangkan Pantai Nula, penting untuk memastikan bahwa bahwa keaslian dan kealamian pantai tetap terjaga dan terpelihara tanpa campur tangan pihak luar yang dapat merusak karakteristik alami yang telah ada sejak lama, sehingga Pantai Nula tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang dalam kondisi yang sama seperti yang mereka nikmati saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat dan pemerintah desa, diketahui bahwa terdapat rencana untuk mengembangkan Pantai Nula yang diusulkan oleh salah satu anggota keluarga pemangku adat.

Meskipun rencana tersebut menunjukkan adanya niat baik untuk memajukan pariwisata

di Pantai Nula, hingga saat ini belum ada gambaran yang jelas tentang bagaimana pengembangan tersebut akan dilakukan. Detail mengenai infrastruktur, fasilitas atau jenis kegiatan yang akan dilakukan juga masih perlu untuk didiskusikan dengan masyarakat setempat dan masih akan bergantung pada proses diskusi dan musyawarah dengan pemangku adat. Keputusan pemangku adat mengenai langkah-langkah berikutnya akan menjadi kunci apakah rencana pengembangan pariwisata ini akan direalisasikan atau tidak.

Perbedaan sudut pandang antara harapan masyarakat dan pemangku adat menunjukkan dinamika yang kompleks. Tidak secara langsung pemangku adat memandang bahwa pengembangan pariwisata berpotensi mengancam tradisi serta warisan turun-temurun yang telah lama dijaga. Pandangan ini tidak selamanya salah, namun di sisi lain pemangku adat tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaat Pantai Nula. Keputusan adat yang kuat ini membuat masyarakat hanya menjadi pihak yang menerima tanpa diberi kesempatan untuk mengambil keputusan.

Partisipasi Masyarakat Nualunat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki harapan yang begitu besar untuk terlibat dalam pengembangan Pantai Nula serta mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata, namun terdapat hambatan untuk tercapainya harapan tersebut. Selain ketidaksetujuan pemangku adat akan pengembangan pariwisata, ketergantungan pada keputusan pemangku adat yang sangat kuat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kondisi yang dialami masyarakat Nualunat merupakan contoh nyata dari hambatan penerapan pariwisata berbasis masyarakat dimana dalam konteks negara berkembang pendekatan umum yang dilakukan adalah pendekatan dari atas ke bawah (Tosun, 2000). Dalam kasus masyarakat Nualunat, mereka memiliki

keajiban moral untuk tunduk dan mengikuti kebijakan pemangku adat, sehingga kasus ini pendekatan dari atas ke bawah dalam skala lokal.

Kondisi partisipasi masyarakat Desa Nualunat dalam konteks pembangunan pariwisata dan pembangunan lokal berada pada tahap yang masih terbatas. Meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam forum diskusi seperti musyawarah desa, peran mereka cenderung belum optimal. Dalam forum-forum tersebut, masyarakat memang diberikan ruang untuk berbicara, menyampaikan aspirasi, dan mengungkapkan pendapat, namun keputusan akhir dari setiap diskusi selalu berada di tangan pemangku adat sebagai otoritas tertinggi dalam struktur sosial Desa Nualunat.

Masyarakat saat ini hanya berperan sebagai penerima kebijakan atau pelaksana dari keputusan yang telah ditetapkan, tanpa memiliki kendali langsung terhadap arah kebijakan yang diambil, termasuk pembangunan pariwisata di Pantai Nula. Jika kondisi ini dihubungkan dengan tangga partisipasi Arnstein (Arnstein, 1969), maka posisi masyarakat Desa Nualunat dapat dikategorikan berada pada tingkat *consultation*, yang termasuk dalam kelompok Tokenism. Pada tingkat ini, masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi atau konsultasi, tetapi masukan yang mereka sampaikan lebih bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, meskipun masyarakat tampak terlibat, keterlibatan mereka hanya sebatas formalitas tanpa kontrol atau pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Konteks serupa yang terjadi di Desa Nualunat juga ditemukan pada pembangunan pariwisata Pantai Oetune, Desa Tuafanu (Kulandima & Lasso, 2023). Di Desa Tuafanu, masyarakat setempat berada pada tingkat partisipasi semu, sehingga tidak mampu untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan pariwisata di wilayah mereka. Proses mendesain model pariwisata yang dikembangkan sepenuhnya berada ditangan pihak Dinas Pariwisata

Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Situasi di Desa Nualunat juga menunjukkan pola yang sama, yaitu masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Namun, terdapat perbedaan dari sisi pemegang otoritas tertinggi. Pemegang otoritas tertinggi bukan berasal dari pihak eksternal melainkan berasal dari pihak internal desa itu sendiri, yaitu pemangku adat. Peran pemangku adat sangatlah besar di Desa Nualunat, sehingga posisinya dapat dikategorikan dalam tingkatan tertinggi yaitu *citizen control* atau kelompok *citizen power* menurut konsep Tangga Partisipasi Arnstein, (Arnstein, 1969). Pemangku adat memiliki kendali penuh dalam setiap keputusan. Pemangku adat memiliki otoritas yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemangku adat.

Apabila ada pihak yang melanggar atau tidak mengikuti keputusan tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan. Sanksi ini dapat berupa denda seperti uang, beras, atau hewan ternak, sanksi diberlakukan agar menjadi efek jera. Dalam beberapa kasus, tindakan disipliner lain juga bisa diberlakukan untuk menjaga ketertiban di Desa Nualunat. Hal ini merupakan salah satu hambatan mengapa hingga saat ini partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Nula belum optimal. Secara langsung menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada setiap keputusan pemangku adat.

Hal inilah yang akhirnya mempengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Keterlibatan yang rendah ini dapat berakibat pada terabaikannya mereka sebagai penerima manfaat utama dari pariwisata.

Kasus di Nualunat membuktikan kajian-kajian yang menyatakan bahwa komunitas tidak pernah sepenuhnya homogen, melainkan sangat heterogen (Hermawan & Hutagalung, 2021; Lasso &

Dahles, 2023; Tjilen et al., 2023). Heterogenitas ini tidak hanya pada perbedaan pekerjaan atau nilai-nilai yang dianut, tetapi termasuk dalam hal kepentingan dan hierarki kekuasaan. Di Nualunat, heterogenitas ini semakin terlihat jelas dalam konteks hierarki kekuasaan. Ada *gap* yang terlihat jelas antar pemangku adat yang memiliki kekuasaan dan otoritas tertinggi dengan masyarakat setempat serta pemerintah desa. Perbedaan hierarki ini menciptakan dinamika kekuasaan yang kompleks, dimana kepentingan setiap kelompok tidak selalu sejalan, baik antara kelompok yang mendukung pariwisata untuk meningkatkan ekonomi dan kelompok yang khawatir terhadap dampak negatif pariwisata. Pemangku adat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan, sementara masyarakat dan pemerintah desa lebih banyak mengikuti keputusan yang diambil oleh pemangku adat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kasus di Desa Nualunat menunjukkan bahwa komunitas tidak pernah sepenuhnya homogen, melainkan heterogen. Heterogenitas ini tidak hanya terlihat dalam pekerjaan atau nilai-nilai yang dianut, tetapi termasuk juga dalam hal kepentingan dan tujuan mereka. Di satu sisi, pemangku adat berusaha untuk menjaga tradisi dan melindungi masyarakat dari perubahan yang berpotensi mengganggu keseimbangan budaya serta kehidupan sosial masyarakat. Pemangku adat khawatir bahwa pembangunan pariwisata di Pantai Nula akan membawa dampak negatif bagi adat istiadat yang telah lama dijaga. Sementara itu, sebagian besar masyarakat melihat Pantai Nula sebagai peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan mereka.

Perbedaan kepentingan ini menciptakan dinamika yang kompleks. Dalam kondisi seperti ini, membuktikan bahwa pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh salah satu pemangku kepentingan saja tanpa memperhatikan aspirasi atau peran pemangku kepentingan

lainnya. Jika pembangunan dilakukan dari atas ke bawah tanpa memperhatikan kompleksitas “suara” masyarakat dan dinamika di dalamnya, maka besar kemungkinan akan terjadi penolakan atau konflik yang justru dapat menghambat keberhasilan pembangunan pariwisata.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat berfokus pada masyarakat, sehingga inisiasi untuk mengembangkan pariwisata sudah seharusnya bergantung pada keinginan (aspirasi) masyarakat. Jika masyarakat mendukung pembangunan pariwisata, maka prosesnya bisa untuk dilanjutkan dengan melibatkan mereka secara aktif. Namun, apabila pada akhirnya masyarakat tidak menginginkan pembangunan pariwisata, maka proyek tersebut seharusnya tidak boleh dipaksakan. Intinya adalah keputusan akhir harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, dengan atau tanpa pariwisata. Berdasarkan kasus di Desa Nualunat, penting sekali untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai apakah Pantai Nula akan dikembangkan menjadi destinasi wisata atau tidak. Jika tidak ada kesepahaman antara pemangku adat dan masyarakat, maka perbedaan pendapat ini dapat terus menerus menjadi sumber masalah kedepannya. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, perlu ada dialog dan diskusi terbuka antara semua pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Kasus yang terjadi di Desa Nualunat dapat menjadi pelajaran penting bagi studi pariwisata berbasis masyarakat di masa mendatang, khususnya dalam menekankan pentingnya elaborasi heterogenitas masyarakat yang menjadi sumber dinamika sosial. Hal ini penting karena setiap komunitas masyarakat memiliki berbagai kepentingan, nilai, dan pandangan yang berbeda, sehingga tidak dapat dianggap sebagai satu kelompok yang homogen. Selain itu, perlu adanya eksplorasi strategi mediasi yang efektif antara otoritas adat dan masyarakat guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Happy, F., Ma'ruf, H., & Wahid, M. I. A. (2022). Peran Remaja Milenial Terhadap Transformasi Desa Wisata Religi Menuju Desa Wisata Halal Studi Di Desa Rogoselo. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 81–98.
- Arifin, S. , A., & Fathurrohman. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan Pariwisata Madura. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wirajaya*, 17(2), 111–126.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Institute Of Planners*, 35(4), 216–224.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research And Education*, 8(1), 47–58.
- Dewanti, R. A., & Gustaman, F. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pasar Wisata Papringan Di Dusun Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. 10(1), 85–95.
- Dewi, S. E. P., & Lasso, A. H. (2022). Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Pariwisata Di Desa Ngargogondo, Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(1), 25–36.
- Fatin, A. D., Devina, F., & Musleh, M. (2024). Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 28–47.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution Of Society: Outline Of The Theory Of Structuration*. University Of California Press.
- Hermawan, D., & Hutagalung, S. S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata

- Di Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 23(1), 124–132.
- Kanom, K., Niluh Ika Aprilia, & Esa Riandy Cardias. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Melalui Kearifan Lokal Di Desa Patoman, Banyuwangi. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 4(2), 79–90.
- Kemenparekraf / Baparekraf RI. (2021, November 29). *7 Desa Wisata Yang Mengusung Konsep Sustainable Tourism*. Kemenparekraf / Baparekraf RI.
- Kulandima, R. U. L., & Lasso, A. H. (2023). Partisipasi Masyarakat Desa Tuafanu Dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 119–131.
- Kurniawan, A., Wulan, T. R., & Muslihudin, M. (2023). Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Banyumas Menuju Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 8(5), 169–181.
- Lasso, A. H., & Dahles, H. (2023). A Community Perspective On Local Ecotourism Development: Lessons From Komodo National Park. *Tourism Geographies*, 25(2–3), 634–654.
- Mirayani, N. K. S., Paristha, N. P. T., & Octaviana, N. K. R. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Dalam New Normal Era. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(1), 18–31.
- Mubaroq, H. N. H. Al, Sholichah, N., & Widyawati. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Lokal Melalui Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Panglipuran, Bali Untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 103–119.
- Prathama, A., Nuraini, R. E., & Firdausi, Y. (2020). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Lingkungan (Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(3), 29–38.
- Ralph, R., & Lippit, R. (2001). *The Nature Of Leadership: A Framework For Understanding Leadership In The Twenty-First Century*. Wiley.
- Sekarningrum, A. A., Lestari, P., & Suparno, B. A. (2020). Manajemen Konflik Komunikasi Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 262–279.
- Susanti, I. N., Ningsih, S. S., & Hidayat, A. A. (2025). Strategi Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 90–103.
- Syarifuddin, D. (2024). Transformasi Kampung Wisata Bunisari : Paradigma Pengembangan Partisipatif . *Jurnal Paradigma*, 5(1), 201–212.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan: Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.
- Tosun, C. (2000). Limits To Community Participation In The Tourism Development Process In Developing Countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.
- Utami, V. Y., M. Yusuf, S. Y., & Mashuri, J. (2022). Penerapan Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Thejournalish: Social And Government*, 3(3), 219–226.

- Violin, S. A., Ayu Nur Anisah, Fanny Seisha Sabrina, Kartika Prima Dani, Cika Ayuadela, & Sampari Timotius Msiren. (2025). Transformasi Ekonomi Masyarakat Desa Karangsalam, Baturaden Melalui Wisata Curug Telu. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(1), 52–65.
- Weber, M. (1978). *Economy And Society: An Outline Of Interpretive Sociology* (Roth Guenther & Wittich Claus, Eds.; Vol. 1). University Of California Press.
- Yulistianeu, A., Fadjrajani, S., & Heryadi, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. *Jurnal Of Geography Education Universitas Siliwangi*, 4(2), 1–12.